

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara merupakan salah satu unit atau satuan kerja pengelola keuangan daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Jawa Timur di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat di wilayah Surabaya Utara. Salah satu kegiatan operasional yang menjadi tugas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara yaitu kegiatan pemungutan atas pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Surabaya Utara.

Kegiatan pemungutan PKB menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan, karena PKB merupakan salah satu unsur yang berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam hal melakukan kegiatan pemungutan atas pajak kendaraan bermotor, bukan tidak mungkin bahwa unit kerja akan menghadapi permasalahan – permasalahan yang membuat wajib pajak terlambat membayar atau karena sebab – sebab lain yang mengakibatkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Atas terlambatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak, timbul tunggakan atau tagihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan adanya tunggakan tersebut, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya pada hampir setiap harinya menerbitkan dokumen penagihan yang terdapat 3 macam, yaitu Surat Pendataan Subjek dan Objek PKB (SPOS),

Nota Perhitungan PKB (NPP), dan Nota Tagihan PKB (NTP) untuk selanjutnya didistribusikan kepada para wajib pajak yang terbukti menunggak melakukan pembayaran PKB. Masing–masing dokumen tersebut memiliki klasifikasi jenis penagihan tersendiri.

Upaya–upaya penagihan tersebut dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara karena memiliki hak atas tagihan atau tunggakan pajak kendaraan bermotor yang akan berpengaruh terhadap unsur pada penerimaan pendapatan daerah. Selain itu, hal tersebut juga merupakan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara dalam menghimpun pajak serta menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Pentingnya mengetahui prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor ini yang bertujuan untuk memenuhi target penerimaan pendapatan asli daerah, penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“PROSEDUR PENAGIHAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Surabaya Utara?

2. Apakah kegiatan penagihan yang dilakukan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor efektif?
3. Apakah prosedur penagihan yang dilakukan telah sesuai dengan dasar hukum atau undang – undang yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan yang dilakukan atas tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menilai tingkat keefektifan dilakukannya kegiatan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah prosedur yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum atau undang – undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memberikan manfaat kepada pihak yang terkait maupun pembaca. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara
Sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan upaya dalam melakukan kegiatan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan atau bahan informasi terkait prosedur penagihan yang dilakukan oleh pihak terkait (UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara) atas tunggakan pajak kendaraan bermotor masyarakat Surabaya Utara.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah pustaka, literatur dan atau acuan (referensi) yang dapat digunakan oleh mahasiswa lainnya terkait dengan penelitian atas prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor.

